

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di Jawa Barat terdapat contoh-contoh kongkret model pengelolaan manajemen kurikulum pesantren yang memiliki ciri khas salah satunya dimiliki oleh Pesantren Agrobisnis Al Ittifaq Ciwidey dan Pesantren Mandiri Kumala Lestari Cianjur. Kedua pesantren ini menerapkan kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum pesantren *salaf*, pesantren *khalaf/modern* dan kurikulum pemerintah dengan program unggulannya yaitu pendidikan pertanian sebagai keahlian bagi para santrinya.

Melalui studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada ke dua pesantren tersebut menemukan bahwa Pada tahun 1970 Pondok Pesantren Al- Ittifaq dibawah pimpinan KH Fuad Affandi mencoba memadukan kegiatan keagamaan dengan kegiatan usaha pertanian (agrobisnis) karena sesuai dengan potensi alam yang dimiliki pesantren. Produk yang dihasilkan dari kegiatan agrobisnis mempunyai nilai keunggulan kompetitif dan komparatif sehingga Pondok Pesantren Al- Ittifaq dijadikan sebagai laboratorium dalam menumbuh kembangkan jiwa mandiri dan wirausaha santri. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq, yaitu mencetak santri yang berakhlak mulia, mandiri dan berjiwa wirausaha. hal ini telah berhasil mendidik para santrinya untuk terlibat langsung dalam pengelolaan agrobisnis, terbukti dengan kesuksesan yang telah diraih oleh pesantren Al Ittifaq berupa penghargaan-penghargaan dari pemerintah salah satu diantaranya adalah Satya Lancana Pembangunan (Penyelamat Lingkungan Hidup) pada tahun 2013 dari Wakil Presiden RI, Pemangku Ketahanan Pangan pada Tahun 2014 dari Gubernur Jawa Barat, Sabilulungan Award pada tahun 2015 dari Gubernur Bandung<sup>1</sup> dan lain-lain. Prestasi-pretasi tersebut diraih dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari setiap stakeholder pesantren yang mengimplementasikan semboyan pondok : tidak boleh ada sedetik waktu yang nganggur, tidak boleh ada sejengkal tanah yang tidur dan tidak boleh ada sehelai

---

<sup>1</sup> Arsip Profil Pesantren Al Ittifaq Ciwidey

sampah yang ngawur.<sup>2</sup> Penerapan kurikulum di pesantren alIttifaq Ciwidey merupakan indikator penyebab dari ketercapaian itu semua, hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Agrobisnis Ust zainal Arifin, namun menurut asumsi peneliti bahwa manajemen kurikulum di pesantren al ittifaq belum berjalan secara optimal dikarenakan program agrobisnis yang menjadi unggulan hanya di fokuskan kepada santri *salaf* yaitu santri yang hanya mengikuti program pesantren dan agrobisnis.hal ini bertentangan dengan teori menurut (Gunawan 2012: 3) kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Sementara Daradjat (Gunawan 2012 :4) mengatakan bahwa kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

Berbeda dengan Pondok Pesantren Agrobisnis Kumala Lestari Cianjur yang merupakan salah satu dari beberapa pesantren yang memiliki unit usaha agrobisnis berupa taman wisata alam mangrove seluas 98 Ha yang telah diresmikan menjadi tempat wisata alam mangrove oleh Presiden Indonesia pada tahun 2006, kemandirian pesantren dari hasil agrobisnis inilah yang menjadi fokus utama program kewirausahaan pesantren. selain dari pada itu internalisasi nilai kemandirian kepada para santri dan pengurus pesantren merupakan suatu program yang ditekankan dipesantren dalam mengelola lahan pertanian seluas 80 Ha agar mampu bersaing di era global yang menuntut manusia untuk memiliki skill dan juga suatu gambaran cita-cita pendiri untuk mencetak generasi yang bertafaqquh fiddin serta mandiri secara ekonomi. Pesantren Agrobisnis Kumala Lestari yang menerapkan kurikulum pesantren salaf, pesantren modern dan kurikulum pemerintah yang dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu pembelajaran. Implementasi kurikulum di pesantren mandiri Kumala Lestari belum berjalan dengan lancar hal ini disebabkan terjadinya mis manajemen antara sistem pesantren dan Sekolah sehingga menghambat terhadap kinerja para guru dan menurunkan semangat belajar para santri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara bersama Ust Zainal Arifin selaku Ketua Divisi Agrobisnis Al Ittifaq

<sup>3</sup> Wawancara bersama Ust Muslim Rasyid slaku pengasuh Pondok Pesantren Kumala Lestari

Dari sisi manajerialisme, pondok pesantren ini tergolong sudah cukup modern. Kepemimpinan dominan kiai tidak begitu terlihat. Bahkan, sebagaimana informasi yang didapat penulis dari salah seorang pengurus, kiai lebih sibuk mengurus aspek-aspek pengembangan pondok pesantren dari sisi melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, di luar pondok pesantren. Semisal dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Kiai juga sudah mendelegasikan kewenangan yang cukup luas. Di samping itu, kiai juga sangat memperhatikan kompetensi dan *skill* para pengurus dalam proses pengelolaan pondok pesantren ini.<sup>4</sup>

Terjadi Mis Manajemen kurikulum di kedua pesantren tersebut, indikatornya adalah ; kurangnya prestasi intra kurikuler yang di raih santri/siswa, rendahnya minat santri/siswa untuk melanjutkan pendidikan, kurangnya akuntabilitas guru dalam manajemen kurikulum, perencanaan dan pelaksanaan kurikulum tidak sesuai, evaluasi kurikulum yang kurang optimal. Adapun faktor penyebabnya adalah adalah rendahnya kualitas input santri/siswa, kebijakan Yayasan yang tidak konsisten, ketidak sefahaman terhadap visi, misi dan tujuan lembaga dan, manajemen kurikulum yang tidak optimal, fleksibilitas yang diterapkan dipesantren terkadang menjadi hambatan bagi program-program pemerintah yang bersifat *saklek*.<sup>5</sup> Fenomena ini menunjukan bahwa integrasi kurikulum pesantren dan sekolah meski ada formulasi yang pas sebagai salah satu kurikulum ideal yang saling melengkapi beberapa kelemahan masing-masing. Berawal kerangka teori dan wawancara sekilas di atas, maka penulis meneliti seberapa besar kendala yang dihadapi oleh pesantren dalam menggabungkan kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah yang berbasis agrobisnis dan bagaimana strategi dalam memformulasikan segala unsur kurikulum tanpa menggerus nilai-nilai kepesantrenan, maka peneliti memberi judul penelitian tugas akhir ini “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Berbasis Agrobisnis di Pondok Pesantren Agrobisnis Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren al Ittifaq Ciwidey.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan wakil pimpinan pesantren agrobisniskumala lestari

<sup>5</sup> Wawancara dengan pengasuh Pesantren AgrobisnisKumala Lestari dan Al Ititfaq Ciwidey.

Pesantren sebagai sebuah 'institusi budaya' yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada ditengah kehidupan sosial masyarakat, kendati kebanyakan pesantren memosisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat seperti ekonomi, sosial dan politik. Potensi ekonomi sangat besar dengan jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 4,328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (Puskopontren) Jawa Barat dan kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar menggelar magang usaha bagi 204 santri. Pengembangan potensi ekonomi di pesantren Jawa Barat dengan jumlah pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri.<sup>6</sup>

Dukungan sumber daya manusia yang profesional untuk mendukung berjalannya sebuah proses manajerialisme, berasal dari ajaran-ajaran Islam. Misalnya, meminjam landasan yang diungkapkan oleh Isma'il Yusanto, profesionalisme kerja dijelaskan dalam Q.S.Az-Zumar:39 dan Q.S.Al-Isra': 84, sebagaimana ayat berikut:

فَلْيَقُومُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَعِلُّمٌ فَيَسُوفَ تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui"<sup>7</sup>

فَلْيَكُلُّ يَعْملُ عَلَىٰ شَاكِلَتِيهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing- masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya"<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lugina Ugin, *Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.4Number 1, Dec 2017

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009), hlm.458

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009),hlm.282

Dua ayat di atas merupakan landasan manajerial bahwa segala sesuatu harus dipasrahkan kepada semua orang yang berkompeten dalam bidangnya, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka kehancuranlah yang akan menghampiri. Rasulullah SAW pun memberikan kewenangan kepada para sahabatnya agar melakukan pekerjaan duniawi mereka. Hal ini menegaskan bahwa dalam urusan keagamaan mungkin para kiai dan pengasuh pondok pesantren merupakan ahlinya, tapi di sisi ilmu-ilmu kekinian, tidak banyak bisa diakses oleh kiai. Keahlian ini biasanya dimiliki oleh seorang peneliti dan akademisi. begitupun sebaliknya. Bagaimana bisa suatu perkara yang tidak kita kuasai dipaksakan untuk kita kerjakan sedangkan masih ada yang mampu melakukan ini namanya *dzalim* yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat harus ikut serta terlibat dalam pembangunan pendidikan, tidak saja dari segi material dan moral, namun kontribusi berarti yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini meski jadi perhatian serius bagi pemerintah dan semua pihak sehingga outcome pendidikan diharapkan akan menjadi semakin bermutu dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan kemajuan zaman dengan tetap menganut nilai, etika serta kearifan lokal. Pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan kepribadian dan peradaban kemanusiaan. Memperhatikan sejarah maka dunia pendidikan mengalami perkembangan secara dinamis, mulai dari materi pelajaran, sistem pembelajaran, hingga manajemen pengelolaan.

Salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Banyak ahli mengemukakan bahwa pesantren merupakan salah satu institusi yang terpenting dan tertua di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan pengetahuan keagamaan Islam. Sebelum Belanda datang Lembaga pendidikan tipe pesantren telah terlebih dahulu berdiri di tanah Nusantara<sup>9</sup>. Lembaga pondok pesantren sebagai institusi swasta yang menjadi lembaga pendidikan khas bangsa Indonesia merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat untuk bersama

---

<sup>9</sup> Endang Turmudi, "Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional" dalam Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXXIV No. 2 (2008), hlm. 78.

mencerdaskan generasi bangsa dari kebodohan ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan perkataan Dr Soebardi dan Prof. Johns yang dikutip Zamakhsyari Dhafier menegaskan bahwa pada periode antara tahun 1200 dan 1600 adalah ujung tombak pembangunan Peradaban Melayu Nusantara.<sup>10</sup> Eksistensi pesantren sudah tidak diragukan lagi bagi bangsa Indonesia, hal ini terbukti banyak tokoh-tokoh bangsa yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia saat ini. Lembaga ini telah ada berkembang khususnya di tanah Jawa sejak abad ke-17. Keberadaan pesantren dalam sejarah Indonesia telah melahirkan hipotesis yang barangkali memang telah teruji, bahwa pesantren dalam perubahan sosial bagaimanapun senantiasa berfungsi sebagai “platform” penyebaran dan sosialisasi Islam. Pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islam-an, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Secara paedagogis pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.<sup>11</sup>

Keberadaan Pondok Pesantren mendapat pengukuhan lebih lanjut --dari pemerintah sebagai bagian dari pendidikan nasional-- dengan disahkannya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, dituntut adanya pembinaan peserta didik yang dilaksanakan secara berkeimbangan antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas, serta peningkatan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Asas pembinaan semacam inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia, agar tetap „dilihat“ bahkan ketika modernitas dan iptek cenderung semakin maju.

---

<sup>10</sup> Zamakhsyari dhafier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta:LP3ES,2015),hlm 36

<sup>11</sup>Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta, Paramadina 1997), hlm. 107

Pondok pesantren mempunyai banyak identitas asli manajemen diantaranya ada dua katagori akademik yang sudah diasumsikan jauh-jauh hari oleh para ilmuan, yaitu dominannya kepemimpinan kiai dan kemandirian pengelolaannya. Pesantren berdiri atas inisiasi sosok kiai dan partisipasi aktif masyarakat didalamnya semenjak berdiri hingga beberapa dekade selanjutnya pesantren semakin menunjukkan identitasnya sebagai lembaga yang mampu berdiri sendiri walaupun seiring dengan bergulirnya waktu banyak pesantren yang didirikan oleh pemerintah namun hanya sedikit dan itu pun masih jauh dari “perhatian“. Seringkali institusi umum yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan dan pengembangannya. Hal itu tidak menjadikan pesantren surut semangat dalam menegakkan ajaran islam dengan kemandirian dan sosok kiai yang rela berjuang mengorbankan segalanya untuk kemajuan pesantren demi mencerdaskan dan kejayaan islam.

Keberhasilan suatu pondok pesantren tidak terlepas dari peran kiai dan aspek kemandirian, sebagaimana pendapat penulis bahwa ada dua kontesatsi pemaknaan kemandirian pondok pesantren dalam bingkai kesejarahan. *Pertama*, partisipasi swadaya masyarakat merupakan kekuatan kemandirian pondok pesantren. Dalam hal ini swadaya masyarakat mendukung penuh perkembangan dan kemajuan pondok pesantren dengan bahu membahu menyumbangkan hartanya di desa mereka masing-masing untuk kemajuan pesantren. *Kedua*, kekuatan kemandirian pondok pesantren berada pada sosok “kegigihan” kiai mempertahankan lembaganya tersebut. Umumnya, para kiai yang mendirikan pondok pesantren memiliki lahan dan tanah yang sangat luas dan secara umum, dijadikan lahan penghasil sebagai penyuplai proses transmisi keilmuan di pondok pesantren mereka.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan manajemen; tidak dapat dibantah lagi bahwa manajemen merupakan aspek penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki seluruh aspek kehidupan manusia; karena dengan manajemen dapat diketahui kemampuan dan kelebihan serta dapat dikenali kekurangan suatu

---

<sup>12</sup> Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm.17

organisasi. Manajemen menunjukkan cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen dapat mengurangi hambatan dalam pencapaian tujuan serta memberikan prediksi dan imajinasi agar segera mengantisipasi dengan cepat perubahan lingkungan<sup>13</sup>. Demikian pula halnya dengan dunia pendidikan; maka peranan manajemen pendidikan sangat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Pidarta merumuskan; manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>14</sup>. Sementara Tilaar berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan<sup>15</sup>. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian kegiatan proses kerjasama suatu organisasi pendidikan dalam pencapaian tujuan yang wilayah pembahasannya sangat luas.

Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan, adalah kurikulum<sup>16</sup>. Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan.

Istilah kurikulum sebagaimana halnya lembaga pendidikan formal, tidak didapat pada pondok pesantren. Kecuali jika yang dimaksud sebagai *manhaj* (arah pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren telah memiliki “kurikulum” melalui *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada para santri<sup>17</sup>. Menurut Amir Hamzah, seperti dikutip Hasbullah; muatan *manhaj* pesantren lebih terkonsentrasi pada ilmu-ilmu agama, semisal sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem

---

<sup>13</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam; Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 7

<sup>14</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 4

<sup>15</sup> H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 31

<sup>16</sup> Sarimuda Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 13.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam – Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2001), hal 43



yurisprudensi Islam, hadits, tafsir, Al-Qur'an, teologi Islam, tasawuf, tarikh dan retorika<sup>18</sup>. Senada dengan itu, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa istilah kurikulum tidak dikenal di dunia pesantren, terutama masa prakemerdekaan, walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan Kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut<sup>19</sup>.

Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerja sama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Berangkat dari bentuk kurikulum tersebut, maka dalam pelaksanaan kurikulum, sangat diperlukan suatu pengorganisasian pada seluruh komponennya. Dalam proses pengorganisasian ini akan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses-proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya.

Bentuk pondok pesantren seperti yang diungkapkan para ahli merupakan suatu usaha dalam memberikan batasan dan pemahaman yang lebih mengarah kepada bentuk pesantren. Walaupun demikian, sesungguhnya perkembangan pondok pesantren tidak terbatas pada satu tipe, namun dapat lebih beragam banyaknya sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Senada dengan M. Ridwan Natsir (2005:87-88) dalam bukunya *mencari tipologi format pendidikan*

---

<sup>18</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 26-27

<sup>19</sup>Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 59.

*ideal* ada lima klasifikasi, antara lain: (1) Pondok pesantren salaf (2) Pondok pesantren semi berkembang (3) Pondok pesantren berkembang (4) Pondok pesantren khalaf/modern (5) Pondok pesantren ideal. Pondok pesantren yang menerapkan pendidikan keterampilan seperti agrobisnis tanpa menghilangkan identitas kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan zaman telah memberikan corak tersendiri bagi perkembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Dengan adanya bentuk pesantren tersebut, diharapkan alumni pondok pesantren benar-benar mampu menyanggah predikat *khalifah fil ard* yakni generasi yang mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

Terlepas dari fenomena, bukti, dan landasan dogmatis diatas, penelitian ini ingin mengangkat sebuah fakta-fakta tambahan tentang kurikulum kedua pondok pesantren tersebut serta kontribusi agrobisnis dalam menopang kebutuhan pesantren.

## **B. Rumusan Penelitian**

1. Bagaimana analisis perencanaan kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey ?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey ?
4. Apa Kontribusi agrobisnis bagi pondok pesantren Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi perencanaan kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey?
2. Untuk mengidentifikasi implementasi kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey ?
3. Untuk mengidentifikasi evaluasi kurikulum di Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al- Ittifaq Ciwidey ?
4. Untuk mengidentifikasi kontribusi agrobisnis bagi pondok pesantren Pondok

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diperuntkan kepada Civitas Akademika UIN SGD Bandung; yang dapat menjadi salah satu literatur bagi keluarga besar UIN SGD Bandung baik sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan dan pengelolaan lembaga maupun sebagai bahan pustaka bagi penyusunan tesis atau makalah.
- b. Peneliti; pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (dua) di UIN SGD Bandung. Selain itu hasil penelitian ini tentu dapat memberikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran peneliti mengenai lembaga serta melatih diri dalam *research* ilmiah

##### 2. Praktis

- a. Pondok Pesantren Kumala Lestari Cianjur dan Pondok Pesantren Al-Ittifaq; hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan evaluasi juga masukan dalam peningkatan pengembangan wirausaha lembaga.
- b. Masyarakat umum; hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi upaya-upaya pengelolaan dan strategi pengembangan wirausaha pesantren serta merealisasikannya di dunia lembaga.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Yusuf Hamdani. 2009. *Manajemen Pondok Pesantren* (Studi kasus di Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapkyak Wetan Yogyakarta). Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapkyak Wetan Yogyakarta telah menerapkan manajemen secara modern mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, namun masih belum optimal.

Kemudian faktor pendukung penerapan manajemen pendidikan di pesantren adalah adanya dukungan dari seluruh elemen pesantren sehingga loyalitas terhadap

pesantren begitu tinggi. Hal ini yang memudahkan bagi pimpinan dalam mengatur semua *stakeholder* yang ada.

Faktor penghambatnya adalah perbedaan pandangan terhadap visi pesantren sehingga pengasuh tidak fokus dalam mengurus santri, rendahnya gaji, lemahnya pengawasan, rangkap jabatan, masih tumpang tindih antara tugas fungsi suatu jabatan, krisis kaderisasi yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

2. Najih Anwar. 2007. *Manajemen Pesantren dalam Penyiapan wirausahawan* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan). Tesis Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Malang

Simpulan penelitian ini bahwa pesantren fokus terhadap mempersiapkan santri-santri yang siap mandiri secara ekonomi sehingga mereka mampu bertahan hidup di masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan semua proses yang dilakukan cukup baik dan terencana sehingga semuanya sesuai dengan harapan dan tujuan pesantren.

3. Muhammad Rouf. 2016. *Manajemen Kurikulum Integratif Madrasah-Pesantren* (Studi Multisitus di MAN 1 Malang dan Madrasah Terpadu MAN 3 Malang). Tesis Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Malang.

Hasil dari penelitian di MAN 1 Malang dan Madrasah Terpadu MAN 3 Malang ini adalah: 1) perencanaan kurikulum integratif madrasah-pesantren di dilakukan dengan: a) mengintegrasikan tujuan kurikulum dan b) mengintegrasikan pengorganisasian isi kurikulum. 2) Pelaksanaan kurikulum integratif madrasah-pesantren dilakukan dengan: a) mengintegrasikan program pelaksanaan kurikulum dan b) mengintegrasikan supervisi pelaksanaan kurikulum. 3) Evaluasi kurikulum integratif madrasah-pesantren dilakukan dengan mengevaluasi kurikulum secara koordinatif antara madrasah dan pesantren, yang meliputi: a) evaluasi konteks kurikulum, b) evaluasi input kurikulum, c) evaluasi proses kurikulum dan d) evaluasi produk kurikulum.

## **F. Kerangka Berpikir**

Tidak banyak pesantren yang menerapkan kurikulum berbasis agrobisnis yang mencetak para santri menjadi generasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Salah satu pesantren yang sudah menerapkannya adalah pesantren agrobisnis Al-Ittifaq Ciwidey dan pesantren agrobisnis Kumala Lestari Cianjur. Pondok pesantren tersebut mampu membuktikan sebagai lembaga pendidikan yang layak untuk dijadikan role model dalam penyusunan kurikulum sehingga tercipta alumni yang siap hidup serta menghidupi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Kurikulum pendidikan pesantren saat ini tak sekedar fokus pada kajian kitab-kitab klasik tetapi juga mengintegrasikan dengan kurikulum pemerintah dan penerapan keterampilan bagi para santrinya agar siap bersaing dalam persaingan global. Hal tersebut senada dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Fungsi Manajemen sangat diperlukan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi kurikulum yang mencakup perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Semua fungsi tersebut tidak bisa dipisahkan dari manajemen kurikulum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi lembaga pendidikan.

Perencanaan manajemen kurikulum merupakan suatu proses awal sebelum pengorganisasian dan pelaksanaan, hal ini menjadi penentu dalam sebuah manajemen kurikulum karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu dilaksanakan dengan profesional. Suatu hal yang menjadi penting dalam manajemen kurikulum adalah adanya keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum, hal demikian sering menjadi penyebab *gap* tidak

tercapainya perencanaan kurikulum yang telah disepakati bersama. Keterlibatan personal tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kurikulum

Hal diatas menurut pandangan Oemar Hamalik, 2010:150 menyatakan bahwa pendekatan pertama yang bisa dilakukan dalam perencanaan kurikulum pendidikan adalah yang bersifat “*administration approach*” perencanaan kurikulum ini dilaksanakan oleh pihak atasan tanpa melibatkan guru-guru. Kondisi guru dalam hal ini menjadi pasif karena kebijakan dalam perencanaan kurikulum berasal dari pihak atasan.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan yang bersifat “*grassroot approach*” yaitu perencanaan yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru atau sekolah secara individual dengan harapan bisa di aplikasikan oleh sekolah-sekolah lain. Hal ini mampu membuka ruang kreativitas guru dalam perencanaan kurikulum yang ideal dengan kondisi lingkungan nya untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Hal diatas menjelaskan bahwa guru harus proaktif dalam keterlibatannya dalam perencanaan kurikulum seperti yang telah ditegaskan oleh J.G Owen yang menyatakan bahwa guru adalah manager (*the teacher as manager*).

Kurikulum meski direncanakan secara profesional dengan cara menganalisis kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum. Adapun kondisi yang perlu diperhatikan adalah dalam perencanaan kurikulum adalah, kondisi sosiokultural dan ketersediaan fasilitas. J.G Owen menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak bisa dipisahkan dari perencanaan kurikulum karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan sosial yang didalamnya terdapat interaksi sosial antara guru dan murid, murid dan guru serta guru dan murid dengan lingkungannya. Kemudian kondisi ketersediaan fasilitas merupakan unsur yang sangat penting dalam implementasi kurikulum yang direncanakan karena tanpa kesiapan fasilitas sebgus apapun kurikulum tidak akan berjalan dengan efektif, maka dari itu J.G Owen keterlibatan guru sebagai pelaksana pendidikan dalam perencanaan kurikulum pendidikan sangat diperlukan. Itulah mengapaperlu pendekatan “*from the bottom up*” yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas.

Kemudian pelaksanaan kurikulum sangat erat dengan proses pembelajaran, menurut Ibrahim Bafadhal manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Hal ini sebagai penentu dari manajemen kurikulum karena proses pelaksanaan kurikulum melibatkan seluruh komponen salah satunya adalah guru.

Evaluasi kurikulum merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi kurikulum yang telah direncanakan, evaluasi kurikulum akan dijadikan bahan untuk merencanakan kembali kurikulum dalam pengembangan capaian yang telah di raih. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Suchman bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Suharismi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, M.Pd, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta:2009, hlm 1.

## Kerangka Pemikiran 1.1

